

Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 3, No. 1, 2025, pp. 375−385
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Determinan Kualitas Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Siti Tsuwaibatul Aslamiyah[1,*], Diana Djuwita[1], Nur Eka Setiowati[1]
[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

standar akuntansi pemerintah; pendidikan; akuntabilitas; kualitas laporan keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pendidikan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Populasi yang digunakan ialah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 50 pegawai yang diperoleh dengan metode sensus (jenuh). Pengujian data dilakukan dengan cara uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah dan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pada koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai 0,67 atau 67% yang menyimpulkan bahwa sebesar 67% kinerja pegawai dapat dijelaskan melalui standar akuntansi pemerintah, pendidikan, dan akuntabilitas kinerja, sedangkan sisanya 33% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

KEYWORDS

government accounting standards; education; accountability; quality of financial statements

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of government accounting standards, education, and performance accountability of government agencies on the quality of financial reports. The study was conducted using quantitative methods and the types of data used were primary and secondary data, with data collection techniques through the distribution of questionnaires. The population used was all employees working at the Cirebon Regency Regional Revenue Agency. The sample used in the study consisted of 50 employees obtained through a census (saturation) method. Data testing was carried out by means of validity and reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing using regression analysis methods. The results showed that, partially, the application of government accounting standards and education had an effect on the quality of financial reports. Meanwhile, performance accountability had no effect on the quality of financial reports. The coefficient of determination (R2) shows a value of 0.67 or 67%, which concludes that 67% of employee performance can be explained by the variables of government accounting standards, education, and performance accountability, while the remaining 33% is explained by other variables not used in this study.

Received : *5 April 2025*
Revised : *21 April 2025*
Accepted : *7 May 2025*

**Correspondence to*:
aslamiyah1024@gmail.com

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan adalah persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan agar mampu memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan tersebut telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk membuat serta menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Ishak & Syam, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menyusun laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sudah diterima secara umum. Pemerintah melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) telah menyusun, dan mengeluarkan suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang selanjutnya disebut PP No.24, mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian disingkat dengan SAP, tertanggal 13 Juni 2005. Namun Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menyusun, dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai ganti dari PP No. 24 Tahun 2005 yang berlaku lima tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan yaitu pada tanggal 1 Januari 2015.

Menurut Wiraputra (2014), edukasi kepada pegawai menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Edukasi yang dimaksud yakni latar belakang pendidikan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat ditingkatkan sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sering kali laporan keuangan Pemerintah Daerah disajikan hanya untuk memenuhi fungsi pertanggungjawaban saja, padahal laporan keuangan Pemerintah Daerah harus digunakan untuk media perencanaan, manajerial dan pengawasan (Fontanella, 2012). Suyono (2016), menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, memerlukan pendidikan akuntansi, keterlibatan dalam pelatihan, dan pendidikan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai pendidikan akuntansi agar dapat meningkatkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah. Pegawai yang mempunyai pemahaman akuntansi, akan lebih mudah memahami tugas-tugas yang diperlukan apabila telah memperoleh tingkat pendidikan formal yang memadai. Menurut Putri (2017), pendidikan dapat membantu seseorang dalam membuat laporan keuangan daerah. Perspektif seseorang mengenai cara menghadapi tantangan mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendidikanya, karena seseorang yang berpendidikan tinggi biasanya mendasarkan keputusanya pada pengetahuan dan pengalamanya. Latar belakang pendidikan seseorang menjadi hal yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusanya dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga mampu mendukung kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan.

Kemudian masalah yang tidak bisa dihindarkan dalam pemanfaatan laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintah serta rendahnya pemahaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia pada instansi pemerintah terhadap akuntansi pemerintah. Latar belakang PPK-SKPD (Pejabat

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah) menentukan kemampuan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah. Kemudian, masih rendahnya komitmen untuk memahami dan melaksanakan peraturan yang selalu berubah-ubah yang tidak konsisten antara peraturan yang satu dengan yang lain (Wiraputra, 2014). Latar belakang pendidikan juga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna keuangan pemerintah (Fontanella, 2012).

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, pegawai pada bagian akuntansi memiliki latar belakang bukan dari akuntansi, sehingga akan menyulitkan staff akuntansi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, dan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain pendidikan, akuntabilitas kinerja juga perlu ditingkatkan dalam instansi pemerintahan. Akuntabilitas mengacu pada bentuk pertanggungjawaban dari suatu lembaga atas program kerja dan kegiatan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Laporan yang disusun kemudian disampaikan melalui media pelaporan ini berisi informasi tentang kinerja lembaga pemerintah yang dikenal sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan didasarkan pada kinerja akuntabilitas instansi pemerintah, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut dikirimkan kepada atasan dari masing-masing tenaga kerja. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah lebih unggul, bersih, dan bertanggungjawab (Rahmawati, 2022).

Kredibilitas melemahkan komitmen terhadap pelayanan publik (Ikyarti & Aprila, 2019). Pemerintah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik, harus memberikan transparansi dan akuntabillitas publik dalam pengambilan keputusan (Rabiyah, 2021). Tanggung jawab publik mengacu pada kewajiban para pemberi amanah untuk memberikan pendapat, informasi, dukungan, dan persetujuan atas setiap kegiatan dan proyek yanng menjadi kewajiban kepada para pemberi amanah, yang mempunyai wewenang dan motivasi untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah akan memberikan efek positif dalam pembentukan *good governance*. Hal tersebut juga dapat berdampak positif dalam bidang ekonomi, dan politik (Dwiyanto, 2021). Dalam bidang ekonomi, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mendorong perbaikan siklus investasi. Sementara, dalam bidang politik, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menjelaskan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, dan bertanggung jawab (Bastian, 2011). Akuntabilitas Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon atau yang biasa disebut Bapenda merupakan lembaga instansi pemerintah yang tugas, fungsi serta tata kerjanya diatur tentang tugas, fungsi, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2022. Bapenda bertugas dalam mengelola pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah maupun retribusi daerah.

Pencapaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang mampu meningkatkan kepuasan, dan kepercayaan bagi masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan

dari pelaksanaan visi, misi, maupun tujuan yang ditetapkan dapat menjadi tolak ukur, dan alat evaluasi seberapa besar Bapenda mempertanggungjawabkan program kerja yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 44,88%, dengan target 14,66%, dan realisasi sebesar 6,58%. Ketidaktransparan dalam manajemen keuangan, dan pengelolaan pajak bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, dan menurunkan wajib pajak, serta pelayanan publik yang kurang memadai dari Bapenda dapat menyebabkan ketidakpuasan masayarakat, dan berdampak pada rendahnya kesadaran, dan kepatuhan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses pencatatan keuangan, laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Menurut Halim (2010), laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya pemahaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, dan latar belakang pendidikan yang menunjang kemampuan untuk mengelola laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki kualitas baik mencakup semua informasi yang relevan, jelas, bisa dimengerti dan tidak dimaksudkan untuk menyesatkan (Amin, 2019). Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas jika dapat dipercaya, transparan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Agar laporan keuangan diannggap berkualitas, empat kriteria berikut harus dipenuhi, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan, hukum, atau pimpinan suatu organisai kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan hak untuk meminta informasi pertanggungjawaban. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidakcapaian tujuan organisasi. Menurut Toman (2016), akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban yang diberikan kepada instansi pemerintah untuk menerima tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui mekanisme akuntabilitas secara periodik. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada kewajiban lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan hasil yang mereka capai, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memilliki beberapa indikator antara lain yakni perencanaan strategik, terukur, sumber daya yang efektif dan efisien, mewujudkan visi dan misi, sesuai target, memberikan manfaat, berjenjang dan berkala, alat pertanggungjawaban, tepat waktu, dan alat evaluasi.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan Standar yang digunakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum yakni

melaksanakan keuangan yang transparan. Selain itu, standar akuntansi pemerintah ini juga menjadi pedoman untuk pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi serta menilai pelaksanaan suatu entitas (Haryanto, 2007). Menurut Anggota Institut Akuntan Publik (Setiono, 2019) menyebutkan bahwa indikator Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diantaranya adalah basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi menggunguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, penyajian wajar.

Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung sumber daya manusia agar dapat bersaing didalam dunia pekerjaan ataupun untuk kemajuan di era globalisasi. Menurut Wirawan (2019), latar belakang pendidikan adalah pengembangan kemampuan, sikap, dan perilaku melalui organisasi tertentu atau tidak terorganisir, termasuk kemampuan, sikap, dan perilaku saat ini dan yang akan dating. Menurut (Tanjung, 2011) indikator-indikator latar belakang Pendidikan diantaranya adalah jenjang pendidikan, spesifikasi atau kesesuaian jurusan,

METODE

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan untuk tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif jenis asosiatif dengan tujuan untuk menguji hubungan kausal. Penelitian asosiatif hubungan kausal adalah penelitian yang mempunyai sifat sebab-akibat, di mana variabel independen bereperan sebagai faktor yang memengaruhi , sementara variabel dependen sebagai yang dipengaruhi (Sugiyono, 2018).

Populasi didefinisikan sebagai suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang dipilih oleh penliti untuk diteliti dan disimpulkan berdasarkan karakteristik dan kualitas tertentu (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yakni berjumlah 101 responden. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang mencerminkan jumlah maupun karakteristik yang dari keseluruhan populasi. Sampel yang diperoleh benar-benar harus mewakili populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* untuk pendekatan teknik *sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon yakni berjumlah 44 responden yang memahami akuntansi.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses dalam penelitian yang dinilai strategis, dikarenakan mempunyai tujuan utama dalam memperoleh data (Sugiyono, 2018). Data penelitian dikumpulkan melalui item pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan secara sistematis dengan maksud untuk menggali informasi dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas data, diperoleh nilai untuk setiap variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pendidikan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas laporan keuangan untuk jumlah sampel sebesar 44 adalah sebesar 0,251. Dari hasil uji

validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung > r tabel. Maka dapat diambil kesimpulan dari semua butir item yang sudah diuji oleh peneliti dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas data, diperoleh nilai untuk setiap variabel kualitas sistem informasi akuntansi, keamanan sistem informasi akuntansi, dan kinerja pegawai untuk jumlah sampel sebesar 44 adalah α > 0,60. Maka dapat diambil kesimpulan dari semua butir item yang sudah diuji oleh peneliti dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji t

Pengujian secara parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tiap-tiap variabel independen secara mandiri dalam mendefinsikan variasi variabel terikat pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial pada tabel 1, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Mengacu pada hasil regresi yang didapat pada variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,374 > 1,683) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05). Hal ini memperlihatkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y) atau dapat dikatakan **hipotesis pertama (H_1) diterima**. (2) Berdasarkan hasil regresi yang didapat pada variabel pendidikan memperoleh nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,674 > 2,004) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,01 < 0,05). Hal tersebut menyimpulkan bahwa variabel pendidikan secara parsial memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) atau dapat dikatakan **hipotesis kedua (H_2) diterima**. (3) Berdasarkan hasil regresi yang didapat pada variabel akuntabilitas memperoleh nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} (1,310 > 1,683) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,19 < 0,05). Hal tersebut menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) atau dapat dikatakan **hipotesis ketiga (H_3) ditolak.**

Tabel 1.
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	1,929	0,268	7,201	0,000
Penerapan SAP	0,034	0,010	3,374	0002
Pendidikan	0,034	0,013	2,674	0,011
Akuntabilitas	0,012	0,009	1,310	0,198

Sumber: Output SPSS, Data diolah Peneliti (2024)

Uji Koefisien Determinasi

Untuk memperoleh kesimpulan seberapa baik model regresi mendeskripsikan variasi pada variabel terikat, maka digunakan koefisien determinasi (R^2) (Ghozali, 2018). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 68%. Dengan itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebesar 68% oleh variabel independen yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pendidikan, dan akuntabilitas. Sedangkan sebagiannya terdapat 32 % dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bagi Badan Pendapatan Derah Kabupaten Cirebon. Dengan adanya pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan oleh pemerintahan, hal tersebut dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Dalam penyusunan laporan keuangan, diperlukannya Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan persayaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat membantu meningkatkan kesesuaian laporan keuangan yang berlaku, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, serta efisiensi, dan konsistensi dalam pelaporan keuangan, serta dapat memberikan kontribusi penting. Namun, dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan seperti, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan dukungan manajemen.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti & Made (2020), (Suprihatin & Ananthy, 2019), (Hidayat et al., 2021), (Lantu et al., 2023). Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Aprsiansyah & Rahayu, 2020), (Susliyanti & Binawati, 2020), dan (Mahartini et al., 2021), yang menjelaskan bahwa dari lingkungan, atau kondisi yang berbeda, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tidak cukup dengan hanya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tetapi perlu memperkuat sistem akuntansi keseluruhan. Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikansi. Penerapan Standar Akuntansi (SAP) harus didukung oleh pelatihan yang memadai, infrastruktur yang memadai, dukungan manajemen, dan perubahan dalam budaya organisasi. Tanpa adanya komitmen, dan upaya yang serius untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan benar, standar akuntansi ini tidak akan memberikan dampak yang bisa diharapkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas di Bapenda. Dengan adanya pendidikan sumber daya manusia bisa memiliki keterampilan, dan pemahaman yang dapat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan bisa tepat waktu. Pendidikan dalam bidang akuntansi, dan keuangan memberikan pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Triswati, 2019), (Siallagan, 2020). Namun, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Yudi & Friyani (2020), dan

(Fabillah, 2020), yang menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan, dan pentingnya pengalaman dalam bidang pekerjaanya, serta pelatihan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ketika seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan sesuai untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik. Latar belakang pendidikan yang baik akan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Bapenda. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mungkin lebih berfokus kepada hasil kinerja yang telah dilakukan selama periode tersebut dan pencapaian target yang sudah dibuat oleh Bapenda. Serta akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan ini memiliki fokus yang berbeda, dimana staf yang memiliki tanggungjawab atas pelaporan kinerja yang yang akan dibuat mungkin memiliki keahlian yang berbeda dengan staf yang menyusun laporan keuangan di Bapenda. Kurangnya fokus pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan. Factor tersebut antara lain yang antara lain yang harus diperhatikan yakni budaya organisasi, dan transparansi.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Mukaromah et al., 2023), (Widaningrum & Fahriani, 2023). Namun, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan (Ridho, 2023), (Kurniawati & Sadeli, 2021), hasil penelitianya menunjukkan bawah akuntabilitas, sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan**.**

KESIMPULAN

Secara parsial, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Aprsiansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62.

Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga.

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press.

Fabillah, I. H. (2020). *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Ukuran Usaha Dan Lamanya Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Umkm Dalam Prespektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Umkm Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Fontanella, A. (2012). Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, *5*(2), 22–30.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2022). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Edisi 2*.

Haryanto, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik.* Semarang: Universitas Diponegoro

Hidayat, D., Sari, M., & Firdaus, A. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. *Valuta*, 7(1), 1–13.

Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.

Ishak, P., & Syam, F. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 120-130.

Kurniawati, A., & Sadeli, D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Brainy: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis Mahasiswa*, 2(2), 18–24.

Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 91–97.

Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1125–1134.

Mukaromah, L., Rachmawati, L., & Rakhmawati, R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pondok Pesantren An-Nuriyah Jember. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 8(2), 208–240.

Putri, A. H. K. (2017). Pengaruh Faktor Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Penegtahuan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(2).

Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar KPP. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3(1), 797–799

Rahmawati, W. R. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 51–58.

Ridho, P. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Setiono, E. P. (2019). *Peningkatan Kualitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Siallagan, H. (2020). Pengaruh pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi dan kompetensi bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Akuntabilitas*, 14(2), 211–224.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (19th ed.).* Alfabeta.

Suprihatin, N. S., & Ananthy, A. A. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(2), 242–252.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1.

Suyono, N. A. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 3(3), 237–248.

Tanjung, R. (2011). *Pengaruh tingkat pendidikan dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Garuda Plaza Hotel Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Toman, Sony. (2016). Grosarium Istilah Pemerintahan (Edisi Pert)

Triswati, S. (2019). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kepribadian Ihsan dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang*.

Widaningrum, V. D., & Fahriani, F. Z. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2425–2435.

Wiraputra, W. K., Sinarwati, N. K., Herawati, N. T., & AK, S. E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *2*(1).

Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60–67.

Yanti, N. S., & Made, A. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).

Yudi, Y., & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 1–19.